



Banggar Dorong Rasionalisasi Anggaran

YOGYAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Yogyakarta akan mendorong rasionalisasi kegiatan dan penggunaan anggaran daerah ditahun anggaran 2017. Hal itu buntut merosotnya suntikan Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat. "Perlu ra-

sionalisasi kegiatan dan anggaran," kata Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta M Ali Fahmi, kemarin.

Namun rasionalisasi tersebut baru bisa dilakukan terhadap kegiatan pada APBD Perubahan 2017. Terkait merosotnya DID yang diterima Pemkot Yogyakarta,

ta di tahun ini, Fahmi menerima informasi bahwa tak hanya terjadi di Kota Yogyakarta saja melainkan juga di daerah lain.

Dipaparkannya, secara total, tahun ini pusat menganggarkan DID sekitar Rp7 triliun untuk 83 daerah di Indonesia, terdiri dari enam provinsi, 65

kabupaten, dan 12 kota. "Namun pemkot memang perlu menanyakan langsung ke Kementerian Keuangan apa alasan pemangkasan besar-besaran DID yang diterima dibanding tahun sebelumnya. Jika alasannya terkait kinerja pemkot, maka bisa jadi bahan eva-

luasi," ujarnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Kadri Renggong mengatakan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan mengevaluasi kegiatan di APBD Perubahan mendatang.

Ke Hal 14

Dari Hal 13

"Kemungkinan akan dievaluasi di Perubahan," katanya.

Diketahui, suntikan DID yang diterima Pemkot Yogyakarta pada tahun ini merosot tajam mencapai 81% dibanding tahun-tahun sebelumnya. Yaitu hanya Rp7,5 miliar, jauh lebih kecil jika dibandingkan dua tahun lalu yang mencapai Rp40

miliar. "Kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, anjlok. Sekitar 81%," ujar Kadri.

Dia mengaku tak mengetahui secara persis apa alasan yang menyebabkan suntikan DID merosot tajam karena Kementerian Keuangan sama sekali tak memberikan penjelasan. Padahal, menurutnya, jika melihat variabel utama agar bi-

sa memperoleh DID, pemkot berhasil memenuhinya. Yaitu meraih minimal opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas hasil laporan keuangan daerah dan penyusunan APBD tepat waktu. "Justru hasil laporan keuangan daerah menunjukkan nilai tertinggi, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," katanya.

Namun demikian, memang ada variabel tambahan yang turut menjadi dasar penilaian oleh pemerintah pusat, diantaranya indeks pembangunan manusia (IPM), penurunan pengangguran, pengentasan kemiskinan, layanan pendidikan, dan fasilitas kesehatan.

Kadri memastikan tetap akan mengoptimalkan peman-

faatan anggaran yang tergolong bonus dari pusat tersebut. Salah satunya adalah untuk biaya operasional pendidikan berupa pemberian honor bagi tenaga pendidik. "Kalau tahun ini anjlok, berarti pos pendapatan berkurang. Tapi kegiatan tetap jalan karena masih ada pos lain yang bisa dimanfaatkan," tandasnya.

● **ristu hanafi**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005